

Dampak Konflik India-Pakistan di Wilayah Kashmir terhadap Stabilitas Keamanan Asia Selatan Pada Tahun 2016-2019

Demita Ayuwanda Mukti¹
Anggun Puspitasari²

Abstract

This study aims to analyze the implications of India-Pakistan conflict in Kashmir region on security stability in South Asia 2016-2019. To analyzing the case, the author use the paradigm of realism and regional security complex theory. This research is a qualitative research. The result of this study indicate that Kashmir conflict between India and Pakistan caused instability in South Asia region with increasing intensity of cross border terrorism, nuclear weapons development and arms races, and countries in the South Asian Region are growing with mistrust each other's.

Keywords: Kashmir conflict, region security stability, India, Pakistan, South Asia

Pendahuluan

Pasca perang dingin Asia Selatan termasuk kawasan yang stabilitas keamanannya rentan di dunia politik internasional. Berbagai potensi konflik yang berkembang semakin memperparah kondisi keamanan kawasan. Konflik perebutan wilayah Kashmir antara India dan Pakistan menjadi salah satu konflik dengan tingkat kompleksitas yang cukup tinggi dan berbahaya di Asia Selatan. India dan Pakistan adalah dua negara bertetangga yang telah terlibat konflik perebutan wilayah Kashmir sejak tahun 1947. Pada awalnya Pakistan merupakan bagian dari negara India, sebelum kedua negara diberikan kemerdekaan oleh Inggris.

Konflik perebutan wilayah Kashmir berawal dari penduduk Kashmir yang mayoritas beragama Islam akan tetapi pemimpin Kashmir saat itu, Hari Singh beragama Hindu. Pada awalnya, Kashmir sebagai wilayah dari *Indian Princely States* diberi hak oleh Inggris untuk memilih bergabung dengan India atau Pakistan. Akan tetapi, pada saat itu, Hari Singh tidak memilih keduanya dan ingin menciptakan negara baru. Hari Singh mengubah

¹ Mahasiswa Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur, demitamukti@gmail.com

² Dosen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur

keputusannya pada tanggal 27 Oktober 1947 dan memilih untuk bergabung dengan India tanpa persetujuan dari penduduk Kashmir. Hal ini tentu saja memicu protes dan amarah dari Pakistan dan penduduk Kashmir yang mayoritas Islam.

Pada tanggal 8 Juli 2016, Burhan Wani, seorang pemimpin pemberontak militan, ditembak mati di desa Bumdoora di wilayah Kashmir oleh pasukan keamanan India. Pembunuhan tersebut kemudian memicu aksi protes dan demonstrasi dalam beberapa hari dengan skala yang sangat besar serta belum pernah terjadi sebelumnya. Korban jiwa yang tewas mencapai 94 jiwa, termasuk seorang akademisi muda Kashmir yang dipukuli hingga tewas oleh tentara India. Kemudian pada tanggal 18 September 2016, sekelompok kecil pejuang jihad yang diyakini berasal dari Pakistan, menyerang pangkalan militer India di wilayah Kashmir dan menewaskan 19 tentara India. Dua pekan setelahnya, serangan balasan dilakukan oleh India ke wilayah Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan yang disebut dengan serangan bedah. Sejak itu, hubungan India dan Pakistan semakin memburuk, bahkan sampai pada ranah budaya.

Mekanisme yang tepat dalam penyelesaian konflik hingga saat ini belum ditemukan. Baik India maupun Pakistan memiliki argumentasi masing-masing dalam perebutan wilayah Kashmir. India dan Pakistan adalah dua negara besar di kawasan Asia Selatan, sehingga konflik antara kedua negara berdampak pada negara-negara lain di Asia Selatan. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kerjasama pertahanan baik dalam bentuk pendanaan, bantuan militer maupun pembelian peralatan pertahanan dari negara lain di luar kawasan. Selain itu hubungan diplomatik diantara negara Asia Selatan cenderung berjalan dengan ketidakpercayaan dan saling curiga (Rahman, 2015). Aksi saling serang, modernisasi militer dan senjata nuklir yang dimiliki kedua negara seharusnya mendorong negara-negara kawasan Asia Selatan untuk merespon dan berupaya memberikan solusi penyelesaian konflik perebutan wilayah Kashmir. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Selatan adalah pembentukan aliansi dalam bentuk SAARC (Mahanani, 2017). SAARC diharapkan mampu menjadi wadah bagi penyelesaian konflik bilateral Kashmir melalui upaya-upaya diplomasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menyimpulkan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, yaitu: "*Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat konflik antara India dan Pakistan di wilayah Kashmir terhadap stabilitas keamanan Asia Selatan pada tahun 2016-2019?*".

Pembahasan

Penelitian ini menganalisa dampak dari konflik perebutan wilayah Kashmir antara India dan Pakistan terhadap stabilitas keamanan Asia Selatan selama periode 2016-2019. Penulis menggunakan tingkat analisa negara dengan menerapkan *regional security complex theory* yang dikemukakan oleh Barry Buzan dan Ole Waever. *Regional security complex theory* (RSCT) menganalisa interaksi antar negara yang berperan sebagai unit dan saling terkoneksi satu dengan yang lain dalam satu kawasan sebagai sistemnya (Burchill, 2014:110). Berdasarkan *regional security complex theory*, interaksi antar negara di kawasan dibagi menjadi dua yaitu, *enmity* dan *amity* (Alvarta, 2018).

Enmity adalah pola interaksi antar negara di kawasan yang bersifat konfliktual atau permusuhan. Sedangkan *amity* adalah pola interaksi antar negara di kawasan yang bersifat kooperatif. Jika dalam kondisi *amity*, maka akan tercipta kompleks yang positif. Saling keterkaitan keamanan nasional antar negara dapat mewujudkan kondisi keamanan bersama di dalam kawasan. Sedangkan dalam kondisi *enmity*, kompleks keamanan akan membawa dampak negatif karena hubungan antar negara saling bermusuhan. Kondisi *enmity* menyebabkan interpretasi akan selalu berjalan negatif dan berpotensi memicu

terjadinya perlombaan senjata. Kondisi *enmity* muncul karena dipengaruhi oleh faktor sejarah yang kental. Untuk memudahkan identifikasi kompleksitas keamanan kawasan, ada empat unsur esensial dalam menentukan pola *amity* dan *enmity* yang ditetapkan oleh Buzan, yaitu: 1) *boundary*, yaitu unsur apa saja yang membedakan satu kawasan dengan kawasan lain, 2) interaksi di dalam struktur anarki, 3) polaritas, yaitu mencakup distribusi power dan konfigurasinya di kawasan, 4) konstruksi sosial yang menjelaskan kecenderungan pola *enmity* atau *amity*.

Konflik Kashmir telah meluas pada kepentingan-kepentingan lain yang lebih besar seperti terorisme dan nuklir. Meningkatnya intensitas konflik Kashmir disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor agama, politik, keamanan dan geopolitik. Sejak terjadi pada tahun 1947, setidaknya telah terjadi tiga kali perang besar dan kerusuhan-kerusuhan lain yang berskala kecil. Tidak hengkannya korban jiwa, tetapi kerugian materi juga dirasakan oleh masyarakat Kashmir. Pada tahun 1965 akhirnya disepakati pembagian wilayah Kashmir dengan India mendapatkan 45% di bagian tenggara dan timur yaitu wilayah Jammu dan Kashmir, sedangkan Pakistan mendapatkan 35% di bagian utara dan barat yaitu wilayah Azad Kashmir, Baltistan dan Gilgit, serta Cina mendapatkan 20% wilayah Kashmir di timur laut, yaitu wilayah Aksai Chin (Iqbal, 2020).

Aksi saling serang antara India dan Pakistan pada tahun 2016 berakar dari pembunuhan terhadap pemimpin kelompok militan Hizbul Mujahidin, Burhan Wani pada 8 Juli 2016. Sebelum dilakukan serangan balasan terhadap India, terjadi demonstrasi berskala besar selama beberapa hari yang memprotes dan mengecam tindakan tidak manusiawi India. Menurut persepsi India penembakan terhadap Burhan Wani adalah tindakan yang tepat untuk menghentikan pemberontakan dari masyarakat Kashmir. Menurut OHCHR sejak insiden pembunuhan terhadap Burhan Wani terjadi peningkatan intensitas gerakan demonstrasi dan kerusuhan. Bahkan pada 18 September 2016 terjadi serangan balasan yang dilakukan oleh kelompok militan Pakistan dengan menyerang pangkalan militer India.

Pada tahun 2019 aksi saling serang antara India dan Pakistan kembali terjadi. Intensitas aksi saling serang jauh lebih tinggi dan berbahaya karena penggunaan kebijakan ofensif diantara kedua negara. Aksi saling serang bermula dari insiden yang terjadi di Pulwama pada 14 Februari 2019. Seorang pembom bunuh diri menabrak mobil yang berisi 300kg bahan peledak di tengah konvoi pasukan polisi cadangan sentral India (Islam, 2019). Akibat insiden tersebut setidaknya 44 personil tewas dan 70 orang terluka. India menuduh Pakistan sebagai pelaku serangan bom bunuh diri tersebut. Akan tetapi melalui sebuah tayangan video, kelompok militan *Jaish-e Mohammed* mengklaim sebagai pelaku serangan tersebut. Menanggapi hal tersebut, India menembaki dan menjatuhkan 1.000 kg bom di kamp-kamp kelompok JeM (Impiani, 2019). India menggunakan 12 jet Mirage 2000 untuk melakukan serangan balas dendam tersebut. Menteri Luar Negeri India mengakui bahwa India telah melakukan serangan dan berhasil membunuh sejumlah besar militan JeM termasuk komandan, pelatih dan pasukan yang dilatih untuk bom bunuh diri atau *fidayeen*. Pada tanggal 27 Februari 2019, Pakistan membalas dengan melakukan serangan udara dan menembak jatuh dua jet tempur India (Islam, 2019).

Pada bulan Agustus 2019 India mengumumkan pencabutan pasal 370 yang memberi hak otonomi khusus pada Kashmir. Hal ini merupakan keberlanjutan dari aksi saling serang pada 14 Februari 2019 lalu. Selain itu India bertujuan untuk mengintegrasikan wilayah Kashmir dengan India. Berdasarkan pasal 370, Kashmir memiliki konstitusi yang independen, bendera terpisah dan membuat undang-undang sendiri kecuali untuk hubungan luar negeri. Dengan pencabutan pasal 370 maka Kashmir harus mentaati dan mematuhi segala bentuk undang-undang India. India mencabut segala akses komunikasi dan penerangan selama beberapa hari di wilayah Kashmir untuk menghindari

Dampak Konflik India-Pakistan di Wilayah Kashmir terhadap Stabilitas Keamanan Asia Selatan 2016-2019

terjadi protes dan kerusuhan. Apabila komunikasi terputus maka media tidak akan mengetahui dan meliput yang telah terjadi di Kashmir.



Gambar 1. Peta Wilayah Kashmir
Sumber: Nations Online, 2019.

Dinamika Keamanan Asia Selatan

Keamanan kawasan merupakan salah satu fokus dalam isu kontemporer di dunia politik internasional pasca perang dingin. Berakhirnya bipolaritas dan kekuasaan dua negara super power Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam politik internasional telah mengalihkan fokus keamanan global menjadi keamanan kawasan-kawasan. Masing-masing kawasan memiliki karakteristik dan kompleksitas konflik yang berbeda dengan kawasan lainnya. Setiap kawasan setidaknya memiliki satu konflik yang mengancam stabilitas keamanannya, salah satunya Kawasan Asia Selatan. Penyebab dari tingginya berbagai potensi konflik di kawasan Asia Selatan adalah karena tidak adanya mutual trust antar negara-negara di kawasan. Tidak adanya mutual trust menyebabkan tingginya tensi konflik internal di dalam kawasan yang memicu ketegangan dan bahkan perang yang hingga saat ini belum terselesaikan.

Potensi konflik yang berkembang di Asia Selatan diantaranya yaitu, konflik teritori atau perebutan wilayah, imigran ilegal dan pengungsi, terorisme dan nuklir. Di Asia Selatan konflik perebutan wilayah cukup banyak terjadi diantara negara tetangga, diantaranya konflik Kashmir antara India dan Pakistan, konflik garis Durand antara Pakistan dan Afghanistan serta konflik pengaturan sungai Gangga antara India dan Bangladesh. Isu

imigran ilegal dan pengungsi juga menjadi salah satu penghambat terjadinya regionalisme di Asia Selatan karena masih kental terjadi diantara negara tetangga. Diantaranya adalah pengungsi dari Bhutan ke India akibat *ethnic cleansing* yang dilakukan oleh pemerintah Bhutan terhadap warga Nepal yang berbahasa Bhutan. Isu pengungsi Bhutan tersebut cukup menyita perhatian internasional karena banyaknya jumlah pengungsi yang saat ini bahkan tersebar hingga Amerika. Selain itu imigran ilegal dari Bangladesh ke India pada tahun 1971 juga menjadi salah satu isu pengungsi yang krusial. Pengungsi tersebut sebagai akibat dari kemerdekaan Bangladesh setelah melepaskan diri dari Pakistan dengan bantuan India. Para pengungsi tersebut merasa terdiskriminasi oleh kuatnya fundamentalisme Islam di Bangladesh dan kondisi politik negara baru yang belum stabil.

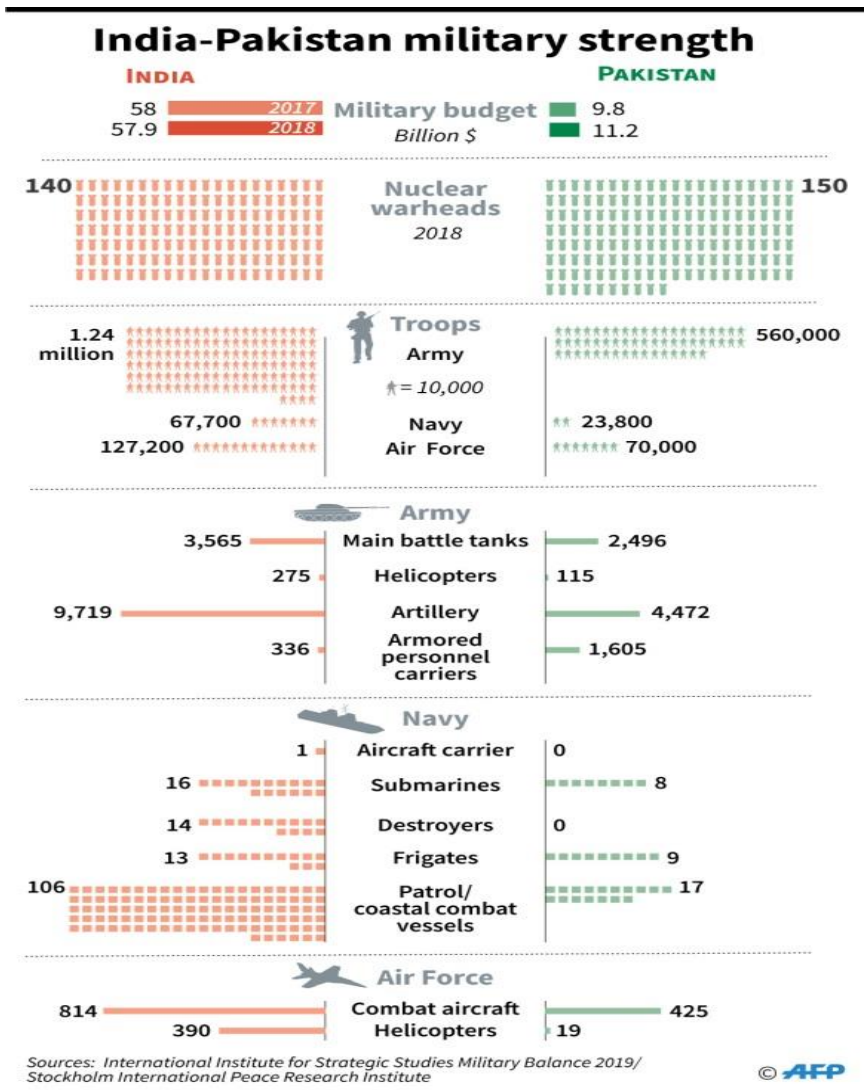
Perkembangan terorisme juga cukup mengkhawatirkan di Asia Selatan, dibuktikan dengan data dari *Global Terrorism Index* (GTI) tahun 2019 yang mencatat bahwa Asia Selatan berada di peringkat kedua sebagai kawasan terdampak serangan dan kematian akibat terorisme pada tahun 2018. Menurut GTI, selama 16 tahun terakhir Asia Selatan tercatat sebagai kawasan dengan skor tertinggi rentan terorisme. Beberapa kelompok teroris utama yang beroperasi di kawasan Asia Selatan diantaranya yaitu, Al-Qaeda, Taliban, *the Khorasan Chapter of Islamic State* (ISK) di Pakistan dan Afghanistan, *the ultra-left Maoist* dan *Lashkar e - Tayyiba* di India serta berbagai kelompok ekstrimis islamis yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Para teroris di Asia Selatan bersembunyi di wilayah perbatasan dan menyamar sebagai penduduk sipil sehingga sulit dibedakan keberadaannya oleh negara. Asia selatan mencatat lebih dari 67.500 kematian selama 16 tahun terakhir sejak 2002 hingga 2018. Menurut data GTI 2019, tiga negara Asia Selatan yaitu Afghanistan, Pakistan dan India berada dalam 10 negara teratas yang terkena dampak serangan dan kematian akibat terorisme di tahun 2018.

Perkembangan nuklir di Asia Selatan tidak terlepas dari meningkatnya intensitas konflik perebutan wilayah Kashmir antara India dan Pakistan. Posisi India dan Pakistan dianggap zero-sum dimana keuntungan yang diperoleh salah satu negara akan menjadi kerugian bagi negara yang lain. Konflik sengit perebutan wilayah Kashmir menjadi titik nyala adu kekuatan senjata nuklir antara India dan Pakistan. Meskipun pengembangan senjata nuklir kedua negara telah dilakukan sejak tahun 1970-an akan tetapi perlombaan senjata nuklir semakin memanas pada tahun 1999. Perang Kargil di wilayah Kashmir pada tahun 1999 menjadi awal mula persaingan nuklir India dan Pakistan yang mengganggu stabilitas keamanan kawasan hingga saat ini. Pada awalnya India dan Pakistan mengembangkan nuklir untuk tujuan damai, akan tetapi ketika konflik di Kashmir semakin tidak terkendali, kedua negara menjadikan nuklir alat untuk mempersenjatai diri dan meningkatkan kapabilitas militernya (Javaid, 2015). Meskipun India dan Pakistan mengembangkan dan memiliki senjata nuklir, akan tetapi kedua negara secara *de jure* tidak diakui sebagai *Nuclear Weapon State* (NWS) dan menolak menandatangani *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT).

Kekuatan militer di Asia Selatan didominasi oleh India dan Pakistan sebagai dua negara *major power*. *Security dilemma* yang terjadi antara India dan Pakistan memicu adanya persaingan senjata (Ladwig III, 2015). Ekspansi militer India secara besar-besaran dianggap sebagai sebuah ancaman bagi Pakistan. Selain itu, keinginan India untuk membangun pangkalan angkatan udara dan menempatkan pasukan militernya di perbatasan serta ambisi India untuk menjadi kekuatan dominan tidak hanya di Asia Selatan tetapi juga di dunia, memicu Pakistan untuk meningkatkan kapabilitas militer dan keamanannya guna membendung keinginan India. Apabila Pakistan hanya berdiam diri dan tidak bergegas membenahi kekuatan militernya maka Pakistan akan kehilangan kendali atas wilayah Kashmir dan secara tidak langsung mengakui kekalahan atas India.

Pada akhirnya perkembangan sistem pertahanan kedua negara hanya akan melanggengkan permusuhan diantara India dan Pakistan.

Menurut *Global Fire Power 2019* India menempati posisi keempat sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia setelah Amerika Serikat, Rusia dan Cina. India secara konsisten meningkatkan eksistensi kekuatan militernya di dunia internasional. Menurut data yang dirilis *Global Fire Power 2019*, Pakistan menempati posisi ke-15 dalam kekuatan militer dunia. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penilaian kekuatan militer dunia adalah, jumlah personel yang aktif (5%), tank (10%), helikopter serang (15%), pesawat (20%), kapal induk (25%) dan kapal selam (25%). Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2016, posisi Pakistan mengalami penurunan. India dan Pakistan berada pada tingkat pembangunan yang cukup berbeda. Sistem politik India demokratis dan perekonomiannya jauh lebih stabil dari Pakistan, dan hal ini cukup mempengaruhi proses modernisasi kedua negara.



Gambar 2. Perbandingan Kekuatan Militer India dan Pakistan
Sumber: International Institute for Strategic Studies Military Balance, 2019

Dampak Konflik Kashmir terhadap Stabilitas Keamanan Asia Selatan 2016-2019

Konflik Kashmir menjadi akar dari tidak terwujudnya regionalisme dan SAARC sebagai institusi yang efektif di Asia Selatan. Variabel-variabel dalam *Regional Security Complex Theory* yaitu, *boundary*, *anarchic structure* atau interaksi di dalam struktur yang anarki, polaritas atau *power distribution* di dalam kawasan dan *social construction* yang menjelaskan kecenderungan pola *enmity* atau *amity* di dalam kawasan dapat digunakan untuk menganalisis konflik Kashmir antara India dan Pakistan.

1. *Boundary*

Menurut *Regional Security Complex Theory*, kondisi dan rasa tidak aman ditimbulkan oleh ancaman yang berasal dari negara tetangga atau berdekatan, bukan dari negara lain yang berjarak jauh (Rahman, 2015). Maka yang dimaksud *boundary* dalam kasus ini adalah wilayah Kashmir dan negara-negara *claimant states*, yaitu India dan Pakistan.

2. *Anarchic Structure*

Klaim India atas wilayah Kashmir dipengaruhi oleh keinginan India untuk menjadi kekuatan dominan di kawasan Asia Selatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa berakhirnya bipolaritas dunia yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet telah menciptakan kesempatan bagi setiap negara untuk menjadi *great power* di kawasan. Selain itu hilangnya rivalitas Amerika Serikat dan Uni Soviet pasca perang dingin menyebabkan struktur kawasan Asia Selatan menjadi anarki bersamaan dengan ketiadaan proyeksi kekuatan kedua negara adidaya.

3. Polaritas atau Power Distribution

Dalam *Regional Security Complex Theory* polaritas atau power distribution berbasis pada *logic of anarchy* yang membuat setiap negara harus berhadapan dengan security competition sebagai dampak dari kedekatan geografis (Norvityanti, 2014). Ambisi India di wilayah Kashmir pada perkembangannya mendorong masuknya kekuatan luar kawasan baik sebagai mediator maupun aliansi dari *claimant states*. Baik India maupun Pakistan bekerjasama dengan kekuatan luar dalam bidang pertahanan untuk memodernisasi instrumen pertahanan negaranya. Dalam hal ini India bekerjasama dengan Amerika Serikat, sedangkan Pakistan bekerjasama dengan Cina.

4. *Social Construction*

Melalui variabel *social construction* dapat dilihat bagaimana dinamika *balance of power* menciptakan *security dilemma*, *mutual distrust* yang mendorong terbentuknya pola *enmity* dan *amity*. Dalam konflik Kashmir pola *enmity* dan *amity* yang terbentuk berpola *chaos*, dimana hubungan kedua negara sebagian besar mengarah pada *enmity*. India yang agresif untuk mempertahankan klaimnya atas wilayah Kashmir membentuk hubungan *enmity* yang kuat dengan Pakistan.

Era postkolonial menjadi awal berdirinya negara-negara modern di Asia Selatan. Menurut *Regional Security Complex Theory*, untuk memahami dan membenarkan klaim dalam studi keamanan regional, perlu untuk mempelajari setiap aktor atau negara bagian kawasan tersebut (Rahman, 2015). Sejalan konflik Kashmir antara India dan Pakistan, perlu mempelajari dan memahami karakteristik negara-negara lain di kawasan Asia Selatan supaya dihasilkan pemahaman yang lengkap dan memudahkan analisis. Pada era postkolonial, agama merupakan kekuatan politik yang muncul dan aktif hingga saat ini dalam dunia politik Asia Selatan. Selain itu faktor dominan lainnya adalah pola demokrasi. Praktik demokrasi di Asia Selatan relatif baru dan hanya sebagian besar negara di

kawasan yang mengadakan pemilihan umum. Pasca perang dingin negara-negara di Asia Selatan mengadopsi sistem pemerintahan yang demokratis di tahun yang berbeda.

Sifat mendasar dari budaya politik di Asia Selatan adalah ketidakpercayaan diantara negara-negara kawasan. Aksi saling tuduh dan menyalahkan negara lain atas gangguan domestik sangat umum terjadi di Asia Selatan. India menyalahkan Pakistan atas dukungannya terhadap terorisme. Pakistan menyalahkan India atas dukungan terhadap kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971. Sri Lanka dan Bangladesh menyalahkan India atas pemberontakan etnis dinegara mereka. Selain itu India juga menyalahkan Bangladesh atas migrasi ilegal ke Timur Laut. Praktek aksi saling tuduh dan menyalahkan di Asia Selatan meningkatkan ketidakpercayaan dan saling curiga diantara negara-negara Asia Selatan yang berdampak pada rasa tidak aman secara keseluruhan di kawasan tersebut.

Pada tanggal 5 Agustus 2019 pemerintah India mencabut pasal 370 yang selama ini memberi hak otonom khusus kepada Kashmir. Berdasarkan *Regional Security Complex Theory*, kebijakan yang dikeluarkan oleh negara great power akan menimbulkan respon dan berpengaruh terhadap kebijakan serta keberlangsungan keamanan di kawasan. Kebijakan pencabutan pasal 370 oleh India menimbulkan respon dari berbagai negara khususnya negara tetangga di kawasan Asia Selatan. Pencabutan pasal 370 tidak melanggar perjanjian internasional apapun. Pencabutan pasal 370 merupakan perubahan internal yang mendefinisikan hubungan wilayah dengan pusat dalam kerangka kerja Federal India. Sebagian besar negara-negara di Asia Selatan berpihak dan mengatakan bahwa pencabutan pasal 370 adalah masalah internal India, kecuali Afghanistan yang menyebutnya sebagai masalah bilateral dan Nepal yang membingungkan dengan dua pernyataannya yang saling bertentangan. Pasca pencabutan pasal 370, ribuan pasukan militer India dikirim ke Kashmir. Selain itu, jaringan komunikasi seperti telepon seluler, *internet broadband*, TV kabel terputus di Kasmir terputus dan diblokir oleh India. Para pejabat politik juga telah dirumahkan untuk mencegah konflik yang lebih panjang.

Konflik Kashmir yang berkepanjangan telah menimbulkan dampak yang menciptakan ketidakstabilan di kawasan dan menghambat terbentuknya regionalism di Asia Selatan. Menurut *Regional Security Complex Theory*, konflik yang terjadi antara dua negara di dalam kawasan akan menciptakan rasa *insecure* dan waspada dari negara-negara lain di kawasan. Hal tersebutlah yang mendasari terjadinya pembentukan aliansi-aliansi oleh negara-negara di Asia Selatan sebagai dampak dari konflik Kashmir yang terus berkejolak. Pembentukan aliansi-aliansi antar negara-negara di kawasan baik berupa organisasi kawasan maupun aliansi dengan negara-negara di luar kawasan Asia Selatan. Pembentukan aliansi di kawasan Asia Selatan yaitu berupa *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC) yang dibentuk pada tahun 1985.

Selain membangun aliansi di kawasan, negara-negara tetangga juga membangun aliansi dengan negara diluar kawasan. Hal ini merupakan bentuk rasa waspada negara-negara tetangga terhadap pembangunan militer India dan Pakistan. Untuk membentengi negaranya dan memperkuat pertahanannya, negara-negara tersebut bekerja sama dengan negara *great power* lainnya seperti Cina, Amerika Serikat dan Rusia baik dalam bentuk pendanaan, pelatihan militer, bantuan militer maupun pembelian peralatan pertahanan. Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, India berbatasan secara langsung dengan hampir semua negara di kawasan, oleh karena itu peningkatan kapabilitas militer dan konflik Kashmir yang belum selesai menjadi ancaman bagi negara-negara tetangga. Selain itu, negara-negara dari luar kawasan tersebut juga mempunyai kepentingan di Asia Selatan. Berdasarkan *Regional Security Complex Theory* kondisi *enmity* menyebabkan intrepretasi akan selalu berjalan negatif dan memicu terjadinya perlombaan senjata. Hubungan India dan Pakistan yang bersifat *enmity* tidak hanya menimbulkan aksi saling

serang yang terus menerus tetapi juga persaingan persenjataan baik konvensional maupun nuklir. Sejak pengembangan nuklir dilakukan oleh kedua negara, telah beberapa kali terjadi uji coba nuklir.

Selain pembangunan militer yang dilakukan oleh India dan Pakistan, negara-negara lain di Asia Selatan juga memodernisasi militernya. Peningkatan kapabilitas militer India dan Pakistan telah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perang terbuka antara kedua negara di Asia Selatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa modernisasi militer India dan Pakistan menimbulkan *security dilemma* terhadap negara-negara tetangga dengan kemampuan militer lebih lemah. Selama beberapa tahun terakhir negara-negara tetangga telah mengembangkan kapabilitas militernya meskipun masih dalam skala kecil, baik melalui peningkatan anggaran pertahanan maupun bekerja sama dengan negara eksternal diluar kawasan Asia Selatan.

Bangladesh adalah salah satu negara yang meningkatkan kapabilitas militernya selama beberapa tahun terakhir. Terbukti pada tahun 2019 menurut *Global Fire Power* Bangladesh menempati posisi ke-45 dan naik 11 tingkat dari tahun 2018. Dengan demikian Bangladesh menjadi negara ketiga dengan kapabilitas militer terkuat di Asia Selatan. Bangladesh memiliki 160 personel militer, 340 tank tempur, 18 artileri self-propelled, 521 kendaraan tempur lapis baja, 36 proyektor roket dan 340 artileri derek. Selain itu, untuk angkatan laut Bangladesh memiliki 89 total peralatan pertahanan dengan dua kapal selam, enam fregat dan korvet, serta 26 kapal patroli. Negara lain yang juga meningkatkan kapabilitas militernya adalah Sri Lanka. Pada tahun 2018 Sri Lanka bekerja sama dengan Rusia dalam upaya memperkuat pertahanan militernya. Sri Lanka meminjam kapal patroli kelas Gepard-5.1 kepada Rusia. Negara lain seperti Afghanistan bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menunjang keamanan dalam negaranya. Bantuan dari Amerika Serikat terhadap Afghanistan berupa pendanaan dan peralatan pertahanan. Sedangkan Bhutan karena hubungan historis yang erat dengan India bekerja sama dalam menjaga keamanan negaranya. Bhutan hanya memiliki 75.000 personil dan dua pesawat dengan anggaran \$10 million. Dalam hal angkatan udara, India bertanggung jawab terhadap pasokan senjata, pelatihan militer bahkan pertahanan udara Bhutan.

Dalam upaya mendukung modernisasi militer dan menunjang pertahanan militernya, baik India maupun Pakistan membuat kebijakan luar negeri. Salah satu bukti kebijakan ofensif India terhadap Pakistan adalah pada bulan Februari 2019. Pada tanggal 26-27 Februari 2019, terjadi aksi saling serang antara India dan Pakistan. Angkatan udara India memasuki wilayah Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan dan menembaki kelompok militan *Jaish-e-Mohammad* (JeM) yang berbasis di Pakistan. India mengakui telah melakukan serangan dan membunuh sejumlah besar militan JeM termasuk komandan, pelatih dan kelompok yang sedang dilatih fidayeen atau bunuh diri dengan menembaki kamp-kamp kelompok militan JeM. Serangan angkatan udara India dipicu oleh bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok militan JeM pada 14 Februari 2019 dan menewaskan 40 tentara cadangan sentral di distrik Pulwama, wilayah Kashmir yang dikuasai India.

Sama halnya dengan India, Pakistan juga melakukan kebijakan yang ofensif apabila kedaulatan dan pertahanan negaranya terancam. Kebijakan luar negeri Pakistan yang ofensif terhadap India dapat dilihat pada peristiwa di Pulwama pada bulan Februari 2019. Pakistan menembak jatuh dua pesawat tempur pasukan militer India yang memasuki wilayah Kashmir bagian Pakistan. Mohammad Faisal, juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan bahwa tindakan tersebut untuk menunjukkan hak dan kemampuan Pakistan dalam mempertahankan diri. Pakistan tidak menginginkan peningkatan intensitas permusuhan akan tetapi siap sepenuhnya jika keadaan menentukan untuk melakukan tindakan ofensif. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Pakistan mengandung

nilai-nilai ofensif apabila terdapat keadaan mendesak dan memaksa untuk melakukan tindakan ofensif untuk mempertahankan kedaulatan negara.

Pada awal konflik Kashmir aktor utamanya adalah India, Pakistan dan Kashmir. Tidak ada kelompok militansi terorganisir yang mempertaruhkan hak atas wilayah Kashmir. Akan tetapi akibat kegagalan resolusi konflik Kashmir oleh India dan Pakistan selama beberapa dekade, beberapa kelompok militan mulai bermunculan dan mendirikan markas di Kashmir. Peningkatan kelompok militan tidak hanya terjadi di Kashmir, India maupun Pakistan tetapi hampir di seluruh kawasan Asia Selatan. Menurut Pakistan, sejak merdeka India terus berusaha mengisolasi Pakistan dari dunia internasional dengan menggoyahkan pertahanan Pakistan dengan berbagai taktik berbeda, seperti mencampuri urusan dalam negeri Pakistan dan menuduh serta mendukung kegiatan teroris di Pakistan. India menempatkan banyak agen intelijen negara di beberapa daerah seperti Baluchistan dan Waziristan Utara untuk memperburuk situasi keamanan dan perdamaian Pakistan.

Tuduhan Pakistan diperkuat dengan penangkapan Kulbhusan Yadav pada tahun 2016 yang mengaku sebagai mata-mata India untuk Pakistan. Dalam sebuah video Kulbhusan mengakui bahwa selama ini terlibat dalam kegiatan terorisme di Karachi dan mendukung pemberontakan nasionalis Baloch di Pakistan. Akan tetapi persepsi India tentang terorisme lintas batas berbeda dengan Pakistan. India berpandangan bahwa Pakistan ikut campur dalam urusan internal India termasuk masalah Kashmir. Selain itu India menuduh Pakistan sebagai dalang dalam kegiatan teroris di India. Menurut India, gerakan separatis di Kashmir di dukung oleh Pakistan. Menurut persepsi India, Pakistan melatih kelompok-kelompok militan untuk berperang melawan pasukan militer India untuk menciptakan anarki dan instabilitas keamanan di India.

Konflik Kashmir antara India dan Pakistan dapat dikatakan sebagai subnasionalisme (Usman, 2017). Subnasionalisme berarti kecenderungan masyarakat untuk merasa lebih terikat secara etnis dan agama dibandingkan sebagai sebuah negara yang heterogen. Kondisi tersebut dinilai menjadi memicu tumbuhnya terorisme dan separatisme bahkan destabilisasi di kawasan Asia Selatan. Salah satu contoh paling berpengaruh adalah ketika India dan Pakistan saling menyalahkan atas gerakan separatisme dan terorisme yang terjadi di kedua negara. Akibat aksi saling tuduh India dan Pakistan menimbulkan rasa saling tidak percaya dan selalu waspada antar negara di kawasan. Selain itu ukuran dan peningkatan kekuatan India meningkatkan kecurigaan negara tetangganya. Mereka berpikir bahwa India akan ikut campur dan mendominasi masalah internal negaranya (Idress, 2019). Untuk itulah negara-negara tetangga mencari aliansi dan bantuan dari luar kawasan. Dapat diamati bahwa kebijakan yang dibuat oleh negara-negara tetangga dipengaruhi oleh ketakutan dan kecurigaan terhadap India.

Sri Lanka adalah salah satu negara yang paling aktif dan menyuarakan ketidakpercayaannya pada India, Pakistan dan SAARC. Pada tahun 2019 Presiden Sri Lanka menyatakan bahwa negara-negara di Asia Selatan cenderung sering memberikan prioritas terhadap keterlibatan dengan aktor-aktor regional lain, tetapi cenderung mengabaikan diri dari memperkuat dan mengembangkan organisasi internal sendiri, dalam hal ini SAARC. Konflik Kashmir telah membuat negara-negara tetangga ragu untuk bekerja sama. Bahkan negara-negara anggota sampai gagal dalam menciptakan lingkungan kerja yang baik dan regionalisme di kawasan.

Kesimpulan

Penelitian ini berjudul Dampak Konflik India-Pakistan di Wilayah Kashmir Terhadap Stabilitas Keamanan Asia Selatan 2016-2019. Pada periode tersebut terjadi aksi saling serang dan kerusakan dengan intensitas yang cukup tinggi antara India dan Pakistan. Tahun 2016 menjadi akar dari aksi saling serang yang berlanjut hingga tahun 2019, yang berawal dari pembunuhan terhadap Burhan Wani, seorang pemimpin pemberontak militan Hizbul Mujahidin. Akibat pembunuhan tersebut kerusakan berskala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, menurut data dari OHCHR tahun 2016. India dianggap telah melanggar hak asasi manusia karena melakukan Tindakan tidak manusiawi.

Penggunaan kebijakan ofensif dalam melakukan aksi saling serang terjadi pada tahun 2019. Kedua negara menggunakan senjata berbasis nuklir untuk menyerang satu sama lain. Aksi saling serang dengan penggunaan kebijakan ofensif tidak terjadi di periode sebelumnya. Peningkatan intensitas konflik Kashmir hingga penggunaan kebijakan ofensif telah menimbulkan dampak dan *security dilemma* terutama bagi negara-negara tetangga di Asia Selatan. Dampak-dampak yang ditimbulkan tersebut dapat dianalisa melalui penggunaan *regional security complex theory* yang dikemukakan oleh Barry Buzan dan Ole Waever.

Konflik Kashmir yang selalu berjalan negatif dan bersifat *enmity* menciptakan perlombaan senjata baik konvensional maupun nuklir antara India dan Pakistan. Perlombaan senjata kedua negara juga berpengaruh terhadap pembangunan militer negara-negara tetangga di Asia Selatan. Kekhawatiran akan adanya perang terbuka mengakibatkan negara-negara tetangga meningkatkan kapabilitas militernya baik melalui kerjasama militer dalam bentuk pendanaan, bantuan peralatan pertahanan maupun pembelian senjata. Pembentukan aliansi dengan sesama negara Asia Selatan maupun dengan negara *great power* juga dilakukan. Selain hal tersebut, konflik Kashmir juga berdampak pada timbulnya budaya *mutual distrust*, dimana hubungan yang berjalan diantara negara tetangga adalah ketidakpercayaan dan waspada. Masing-masing pihak menganggap pihak lain sebagai sebuah ancaman, Hal ini terutama terlihat antara India dan Pakistan yang seringkali terjadi aksi saling tuduh terutama dalam isu terorisme. Sejak konflik perebutan wilayah Kashmir terjadi, kelompok-kelompok militan terus berkembang dan tumbuh di Kashmir, India dan Pakistan. Pertumbuhan kelompok militan dan aktivitas terorisme yang dilakukan di Asia Selatan berdampak pada stabilitas keamanan Kawasan, baik kelompok yang bergerak untuk pembebasan Kashmir menjadi negara merdeka maupun kelompok militan yang didukung oleh India atau Pakistan.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini, maka dari itu penulis mengharapkan kepada para peneliti selanjutnya untuk dapat melengkapi kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini. Peneliti selanjutnya dapat membahas mengenai dampak konflik Kashmir melalui perspektif yang berbeda dari penulis. Penulis memandang bahwa ada salah satu aspek yang dapat dikaji dalam membahas dampak konflik Kashmir yaitu ekonomi dimana aspek ini berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup masyarakat suatu wilayah atau negara. Peneliti selanjutnya dapat membahas dampak konflik Kashmir terhadap keberlangsungan ekonomi baik di Kashmir, India maupun Pakistan. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian dengan periodisasi selanjutnya.

Referensi

- Alvarta, Ivan Samuel. (2018). "Perluasan Keanggotaan NATO ke Eropa Timur: Pencapaian Stabilitas Keamanan Kawasan".
- Burchill, Scott. & Andrew Linklater. (2011). Teori-Teori Hubungan Internasional. Bandung: Penerbit Nusa Indah.
- Dhaka Tribune. (2020), "India Vs Pakistan: Military Strength and Arsenal." <https://www.dhakatribune.com/world/south-asia/2019/02/28/india-vs-pakistan-military-strength-and-arsenal> diakses pada 02 Juni 2020
- Idrees, Muhammad & Prof. Dr. Muhammad Ayaz. (2015). Peace and Conflicts in South Asia: A Case Study of Pakistan and India. Academic Research Journals.
- Impiani. (2019). "Escalation of Military Conflict Between India and Pakistan in the Post Lahore Declaration (1999-2019): Security Dilemma Perspective." Global:Jurnal Politik Internasional 2019 Vol.21 No.2 Page 219-241.
- Iqbal, Rachman Muhammad. (2020). "Respon Pemerintahan India terhadap Kelompok Separatisme Kashmir pada Masa Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi."
- Javaid, Umbreen. (2015). "Reviewing Security in South Asia." JRSP.
- Ladwig III, Walter C. (2015). "Indian Military Modernization and Conventional Deterrence in South Asia." The Journal of Strategic Studies Vol.38 No.5.
- Mahanani, Devi Ratri. (2017). "Stagnasi South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) dalam Mengupayakan Kerjasama di Asia Selatan."
- Nation Online. (2019). "Map of Kashmir India-Pakistan." <https://www.nationonline.org/oneworld/map/Kashmir-political-map.htm> diakses pada 14 Maret 2020
- Norvianti, Mely. (2014). "Natuna dan Transformasi Eksternal Regional Security Supercomplexes Laut China Selatan."
- Rahman, Osiur. (2015). "An Analysis of the Regional Security of South Asia in Post 9/11 Period: Regional Security Complex Theory Approach."
- Usman, Ahmed. et. al. (2017). "The Pakistan-India Security Dilemma- Contemporary Challenges." Journal of Indian Studies Vol.3 No.1 hal. 19-25.